



Kecamatan Kebomas



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA 2025–2029

Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik



kec.kebomas@gmail.com

kec.kebomas



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat **Allah SWT** atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebomas Tahun 2025–2029** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Kebomas selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029**, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta program prioritas kecamatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Melalui penyusunan Renstra ini diharapkan kinerja pemerintahan Kecamatan Kebomas semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini, baik dari unsur perangkat daerah, lembaga masyarakat, maupun seluruh aparatur Kecamatan Kebomas yang telah memberikan data, masukan, dan dukungan selama proses penyusunan berlangsung.

Semoga dokumen Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan **penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.**

Gresik, September 2025
PEMERINTAH KAB. GRESIK
CAMAT KEBOMAS

TRI JOKO EFENDI, S.H.
Pembina
NIP. 19851227 200901 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR TABEL	V
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	12
2.1.2 Sumberdaya Kecamatan Kebomas.....	23
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebomas.....	30
2.1.4 Kelompok Sasaran layanan Kec. Keboams.....	49
2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis	50
2.2.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kebomas...	50
2.2.2 Isu Strategis pada Kecamatan Kebomas.....	52
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DANA RAH KEBIJAKAN	40
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029.....	58
3.1.1 Tujuan Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029.....	58
3.1.2 Sasaran Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029.....	59
3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	67
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	69
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	72
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Perangkat Daerah.....	72
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan pendanaan	89
4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	111
4.4 Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan Prioritas Utama (KPU_ dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	114

4.5	Sub Kegiatan yang mendukung proyek Prioritas Nasional dalam RPJMD Tahun 2025-2029.....	117
4.6	Sub Kegiatan yang mendukung Asta Cita pada Rencana Strategis Kecamatan Kebomas.....	116
4.7	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kebomas.....	121
4.8	Target Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah.....	123
BAB V	: PENUTUP	126
LAMPIRAN	: MATRIKS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektoral lainnya	3
Gambar 2	:	Struktur Organisasi Kecamatan	21
Gambar 3	:	Peta Letak Geografis Kecamatan Kebomas	21
Gambar 4	:	Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Daftar Nama Desa dan Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kebomas	22
Tabel 2.2 : Luas Wilayah Kecamatan Kebomas menurut Desa/Kelurahan	22
Tabel 2.3 : Pembagian wilayah administrasi pemerintahan menurut Desa/kelurahan di Kecamatan Kebomas	23
Tabel 2.4 : Jumlah Penduduk hasil Registrasi menurut Jenis Kelamin	24
Tabel 2.5 : Luas Daerah, Jumlah KK dan Jumlah Penduduk hasil Registrasi	24
Tabel 2.6 : Kepadatan Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kebomas	25
Tabel 2.7 : Jumlah Penduduk Hasil Registrasi menurut Kelompok Umur	26
Tabel 2.8 : Jumlah menurut agama yang dianut di Desa dan Kelurahan	26
Tabel 2.9 : Kondisi Kepagawaian Kecamatan Kebomas Kabupaten gresik berdasarkan Golongan dan Pendidikan	27
Tabel 2.10 : Kondisi Kepegawaian Kecamatan Kebomas berdasarkan Pendidikan	28
Tabel 2.11 : Jumlah Aset Kantor Kecamatan Kebomas pada periode 31 Desember 2024	29
Tabel 2.12 : Kondisi Sarana dan Prasarana pada Kecamatan Kebomas Kab. Gresik	30
Tabel 2.13 : Indikator Kinerja RPJMD dan Capaian Indikator Kinerja	32
Tabel 2.14 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebomas	33
Tabel 2.15 : Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Kebomas	55
Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	63
Tabel 3.2 : Penahapan Renstra Kecamatan Kebomas	69
Tabel 3.3 : Teknik Perumusan Arah Kebijakan Renstra	71
Tabel 4.1 : Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik	76
Tabel 4.2 : Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pencanaan	91

Tabel 4.3	:	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	112
Tabel 4.4	:	Daftar Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMD Tahun 2025-2029	115
Tabel 4.5	:	Daftar Sub Kegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	116
Tabel 4.6	:	Daftar Sub Kegiatan yang mendukung Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	118
Tabel 4.7	:	Target Pencapaian Indikator Utama (IKU) Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029	122
Tabel 4.8	:	Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2030	124

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045; dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. telah mengamanatkan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun rencana strategis Renstra OPD secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap OPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renstra). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD. ***Renencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.*** Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 Ayat menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat

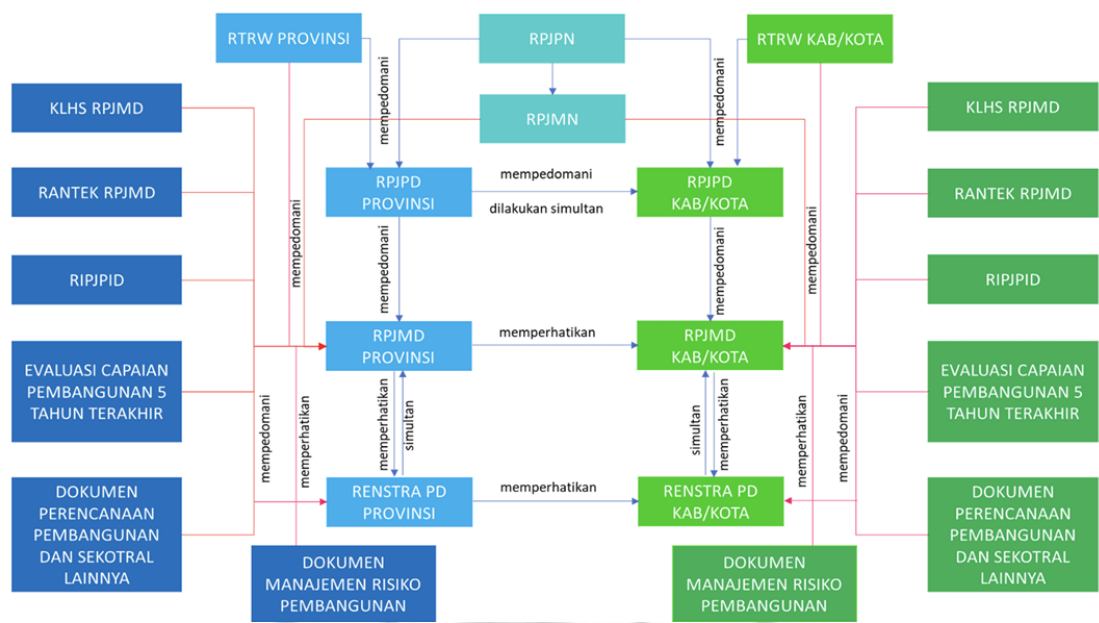
Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Gresik yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Draft Renstra Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2045 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Renstra Kecamatan Kecamatan Kebomas Tahun 2025–2029 berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kebomas disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Kebomas sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Kebomas juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Gresik, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Kebomas yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebomas. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kebomas dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Penyusunan Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025–2029 dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk tata cara penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui beberapa **tahapan pokok**, yaitu:

1. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;
3. Penelaahan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah tahapan persiapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa:

Tahapan persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi kegiatan:

- a. pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. penyusunan jadwal penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
- c. pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- d. Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kebomas tersusun dan di seleksi sebagaimana:

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari para Kasi dan Kasubag serta staf Perangkat Daerah Kebomas yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran
- c. Anggota tim penyusun siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kebomas dan

dipilih orang-orang yang benar-benar mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas Perangkat Daerah, Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang dan sub bidang dan staf yang ada di Perangkat Daerah Kebomas dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kebomas dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkan Renstra Perangkat Daerah.

Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kebomas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kebomas ini adalah sebagai berikut:

- **Penanggung Jawab** : Camat Kebomas
- **Ketua** : Sekretaris Camat Kebomas
- **Sekretaris** : Kasubag Umum dan Kepegawaian
- **Kelompok Kerja** :
 - **Ketua Kelompok Kerja** : Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan
 - **Anggota** :
 1. Kasi Pemerintahan
 2. Kasi Pembangunan
 3. Kasi Kesejahteraan Rakyat
 4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
 5. Kasi Ekonomi
 - **Pembantu pelaksana** : Para staf Kecamatan Kebomas

Terbentuknya Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kebomas tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kebomas perlu memiliki penguasaan dan penyampaian orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah kepada seluruh anggota tim guna melakukan, untuk :

- Penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- Teknis penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan menganalisis
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan setelah Kecamatan menerima surat edaran Bupati Gresik perihal penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Kebomas beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu Perangkat Daerah
2. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
4. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
5. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.

Selanjutnya Tim Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
3. Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030; dan
4. Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan penyusunan **RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KEBOMAS TAHUN 2025-2029**, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi

- Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
32. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
33. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Kebomas adalah untuk:

1. Menyusun arah kebijakan dan program Pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan public.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen Anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) bab dan lampiran yang memuat Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah ini disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH****2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kebomas****2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Kebomas**

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan, maka Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;

- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan

Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan pelayanan pemerintahan kecamatan;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
- g. pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:

- a. Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- b. menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. mengelola keuangan kecamatan;
- e. melakukan koordinasi kegiatan antar Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan.

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Penjabat Sementara;
- f. pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau Pejabat Sementara;
- g. pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa dalam di wilayah kerjanya;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta

- Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Ekonomi

Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang ekonomi.

Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan.

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau Kelurahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan undang-undang;
- e. pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna ; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;

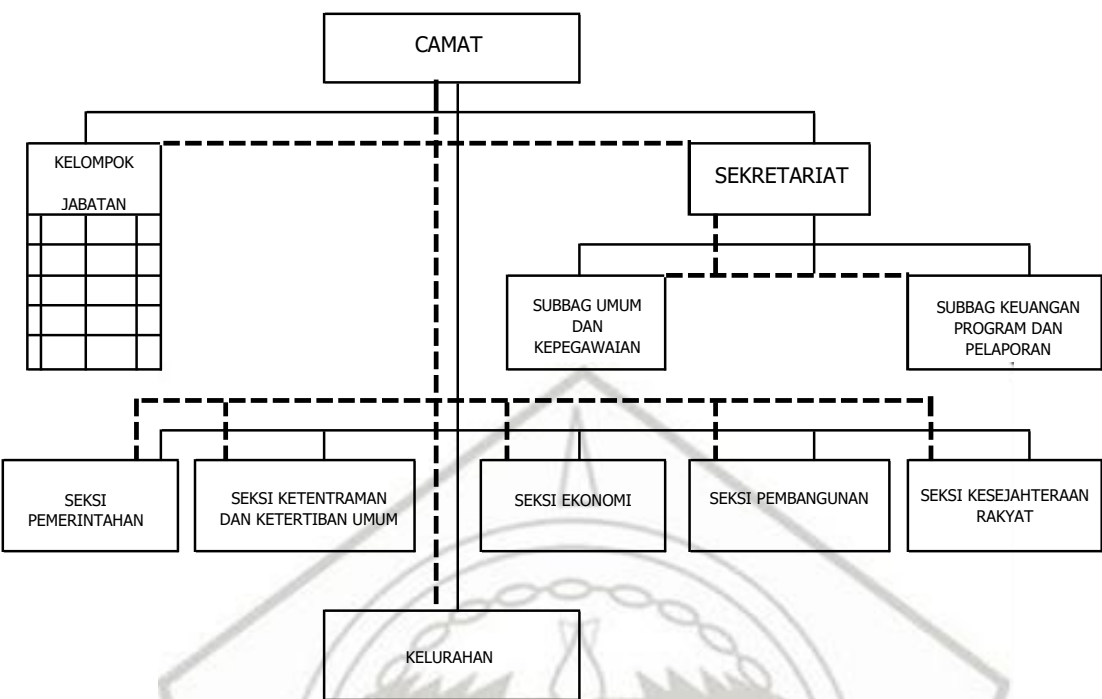
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

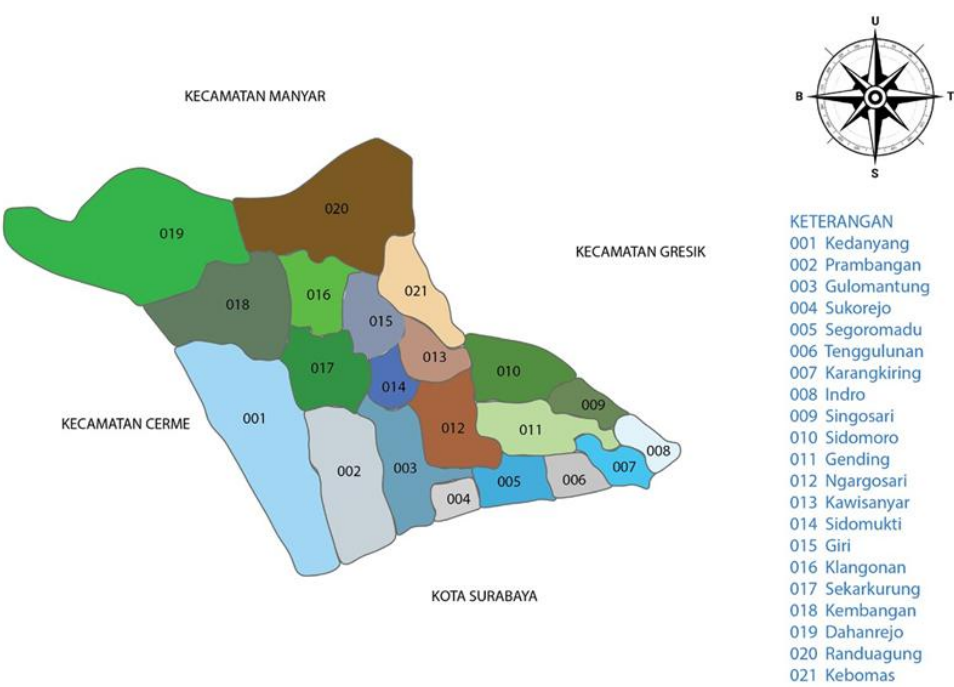
- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Kecamatan Kebomas berdasarkan Perakaturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :



Gambar 2
Struktur Organisasi Kecamatan

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Kebomas



Gambar 3. Peta Letak Geografis Kecamatan Kebomas

Kecamatan Kebomas yang memiliki luas 30.06,00 Km². Dan berada pada ketinggian dibawah ± 4,5 meter di atas permukaan laut atau termasuk daerah dataran rendah dan pegunungan. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kebomas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Gresik
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kota Surabaya
- Sebelah Barat : Kecamatan Cerme

Kecamatan kebomas terdiri atas 10 kelurahan dan 11 desa sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Nama Desa Dan Kelurahan Yang Ada Di Wilayah Kecamatan Kebomas

Desa	Kelurahan
1. Kedanyang	12. Ngargosari
2. Prambangan	13. Kawisanyar
3. Dahanrejo	14. Sidomukti
4. Sukorejo	15. Tenggulunan
5. Segoromadu	16. Gulomantung
6. Karangkring	17. Kebomas
7. Giri	18. Sidomoro
8. Singosari	19. Indro
9. Sekarkurung	20. Kebomas
10. Randuagung	21. Singosari
11. Kembangan	

Berikut kami sajikan data tabel luas wilayah Kecamatan Kebomas :

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kecamatan Kebomas Menurut Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Luas <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan <i>Percentage to District Area</i>
(1)	(2)	(3)
1. Kedanyang	5,34	15,14
2. Prambangan	3,73	10,58
3. Gulomantung	1,93	5,47
4. Sukorejo	0,12	0,34
5. Segoromadu	1,99	5,64
6. Tenggulunan	0,60	1,70
7. Karangkring	0,89	2,52
8. Indro	1,57	4,45

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Luas <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan <i>Percentage to District Area</i>
9. Singosari	0,78	2,21
10. Sidomoro	1,57	4,45
11. Gending	1,04	2,95
12. Ngargosari	1,15	3,26
13. Kawisanyar	0,38	1,08
14. Sidomukti	0,46	1,30
15. Giri	0,23	0,65
16. Klangonan	1,02	2,89
17. Sekarkurung	1,33	3,77
18. Kembangan	4,38	12,42
19. Dahanrejo	3,29	9,33
20. Randuagung	2,10	5,96
21. Kebomas	1,36	3,86
Kecamatan Kebomas	35,26	100,0

Tabel 2.3
Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan menurut
Desa/Kelurahan di Kecamatan Kebomas

No.	Desa/Kelurahan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Kedanyang	√				
2	Prambangan		√			
3	Gulomantung					
4	Sukorejo	√				
5	Segoromadu	√				
6	Tenggulunan					
7	Karangkering		√			
8	Indro					
9	Singosari					
10	Sidomoro					
11	Gending					
12	Ngargosari					
13	Kawisanyar					
14	Sidomukti					
15	Giri	√				
16	Klangonan	√				
17	Sekarkurung	√				
18	Kembangan	√				
19	Dahanrejo	√				
20	Randuagung	√				
21	Kebomas					
	Kecamatan Kebomas	9	2	-	-	-

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Hasil Registrasi Menurut Jenis Kelamin

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
1. Kedanyang	4.997	4.970	9.967
2. Prambangan	1.264	1.293	2.557
3. Gulomantung	1.518	1.528	3.046
4. Sukorejo	961	910	1.871
5. Segoromadu	778	745	1.523
6. Tenggulunan	254	248	502
7. Karangkering	550	529	1.079
8. Indro	3.201	3.086	6.287
9. Singosari	4.939	4.952	9.891
10. Sidomoro	4.296	4.434	8.730
11. Gending	2.028	2.083	4.111
12. Ngargosari	1.472	1.393	2.865
13. Kawisanyar	1.387	1.394	2.781
14. Sidomukti	2.404	2.323	4.727
15. Giri	1.943	1.958	3.901
16. Klangonan	1.567	1.628	3.195
17. Sekarkurung	2.046	2.004	4.050
18. Kembangan	6.462	6.426	12.888
19. Dahanrejo	3.352	3.340	6.692
20. Randuagung	8.081	8.106	16.187
21. Kebomas	2.901	2.914	5.815
Kecamatan Kebomas	56.401	56.264	112.665

Tabel 2.5

Luas Daerah, Jumlah KK dan Jumlah Penduduk Hasil Registrasi

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Luas (Km ²) <i>Area (Km²)</i>	Jumlah KK <i>Number Of Families</i>	Jumlah Penduduk <i>Total population</i>
1. Kedanyang	5,34	3.133	9.967
2. Prambangan	3,73	825	2.557
3. Gulomantung	1,93	912	3.046
4. Sukorejo	0,12	582	1.871
5. Segoromadu	1,99	519	1.523
6. Tenggulunan	0,60	178	502
7. Karangkering	0,89	364	1.079
8. Indro	1,57	2.024	6.287

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Luas (Km ²) <i>Area (Km²)</i>	Jumlah KK <i>Number Of Families</i>	Jumlah Penduduk <i>Total population</i>
9. Singosari	0,78	3.173	9.891
10. Sidomoro	1,57	2.829	8.730
11. Gending	1,04	1.341	4.111
12. Ngargosari	1,15	858	2.865
13. Kawisanyar	0,38	890	2.781
14. Sidomukti	0,46	1.358	4.727
15. Giri	0,23	1.205	3.901
16. Klangonan	1,02	967	3.195
17. Sekarkurung	1,33	1.197	4.050
18. Kembangan	4,38	3.877	12.888
19. Dahanrejo	3,29	1.992	6.692
20. Randuagung	2,10	5.177	16.187
21. Kebomas	1,36	1.853	5.815
Kecamatan Kebomas	35,26	35.254	112.665

Tabel 2.6
Kepadatan Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan
Kebomas

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Kepadatan Penduduk <i>Population density</i>
1. Kedanyang	1.866,48
2. Prambangan	685,52
3. Gulomantung	1.578,24
4. Sukorejo	15.591,67
5. Segoromadu	765,33
6. Tenggulunan	836,67
7. Karangkering	1.212,36
8. Indro	4.004,46
9. Singosari	12.680,77
10. Sidomoro	5.560,51
11. Gending	3.952,88
12. Ngargosari	2.491,30
13. Kawisanyar	7.318,42
14. Sidomukti	10.276,09
15. Giri	16.960,87
16. Klangonan	3.132,35
17. Sekarkurung	3.045,11
18. Kembangan	2.942,47
19. Dahanrejo	2.034,04
20. Randuagung	7.708,10
21. Kebomas	4.275,74
Kecamatan Kebomas	108.919,37

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Hasil Registrasi yang wajib memiliki KTP

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Laki- Laki	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
1. Kedanyang	3.759	3.800	7.559
2. Prambangan	966	992	1.958
3. Gulomantung	1.131	1.148	2.279
4. Sukorejo	712	715	1.427
5. Segoromadu	586	593	1.179
6. Tenggulunan	189	199	388
7. Karangkering	403	407	810
8. Indro	2.380	2.370	4.750
9. Singosari	3.639	3.787	7.426
10. Sidomoro	3.200	3.414	6.614
11. Gending	1.523	1.628	3.151
12. Ngargosari	1.126	1.073	2.199
13. Kawisanyar	1.014	1.048	2.062
14. Sidomukti	1.728	1.708	3.436
15. Giri	1.462	1.470	2.932
16. Klangonan	1.165	1.175	2.340
17. Sekarkurung	1.442	1.474	2.916
18. Kembangan	4.587	4.700	9.287
19. Dahanrejo	2.424	2.478	4.902
20. Randuagung	5.940	6.174	12.114
21. Kebomas	2.152	2.209	4.361
Kecamatan Kebomas	41.528	42.562	84.090

Tabel 2.8
Jumlah menurut agama yang dianut di Desa dan Kelurahan

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Islam <i>Male</i>	Protestan <i>Female</i>	Katolik <i>Catholic</i>	Hindu <i>Hindu</i>	Budha <i>Buddha</i>	Konghucu Lainnya <i>Confucian Other</i>
1. Kedanyang	9.691	188	73	9	6	— —
2. Prambangan	2.532	10	8	—	7	— —
3. Gulomantung	3.001	16	12	—	17	— —
4. Sukorejo	1.871	—	—	—	—	— —
5. Segoromadu	1.505	3	15	—	—	— —
6. Tenggulunan	474	21	7	—	—	— —
7. Karangkering	1.072	1	5	—	1	— —
8. Indro	6.217	43	13	7	7	— —
9. Singosari	9.594	181	98	1	17	— —
10. Sidomoro	8.401	181	101	15	28	— 4

Desa/Kelurahan Village/Kelurahan	Islam Male	Protestan Female	Katolik Catholic	Hindu Hindu	Budha Buddha	Konghucu Lainnya Confucian Other
11. Gending	4.082	19	7	—	3	— —
12. Ngargosari	2.844	12	3	6	—	— —
13. Kawisanyar	2.776	4	1	—	—	— —
14. Sidomukti	4.726	—	—	—	1	— —
15. Giri	3.901	—	—	—	—	— —
16. Klangonan	3.191	4	—	—	—	— —
17. Sekarkurung	3.927	108	12	—	3	— —
18. Kembangan	12.514	273	86	9	6	— —
19. Dahanrejo	6.605	66	9	5	7	— —
20. Randuagung	15.814	278	82	8	5	— —
21. Kebomas	5.664	100	39	7	4	— 1
Kecamatan	110.40	1.508	571	67	112	— 5

Kondisi Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kebomas didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di Kecamatan Kebomas sampai dengan tahun 2025 sebanyak 50 orang ASN dan 39 Pegawai Non ASN yang terbagi dalam Sekretariat dan 6 Seksi. Kondisi kepegawaian berdasarkan Golongan dan Pendidikan digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (Ib)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (Ic)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (Id)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (IIa)	-	-	1	-	-	-	1
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur (IIc)	-	-	2	-	-	-	2

No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
	Pengatur Tingkat I (IId)	-	-	2	-	-	-	2
3.	Penata Muda (IIIa)	-	-	4	-	2	-	6
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	-	-	-	-	11	1	12
	Penata (IIIc)	-	-	1	1	1	-	3
	Penata Tingkat I (IIId)	-	-	1	-	18	2	21
4.	Pembina (IVa)	-	-	-	-	-	3	3
	Pembina Tingkat I (IVb)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Muda (IVc)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Madya (IVd)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IVe)	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	11	1	32	6	50

Berdasarkan Data tersebut diatas, Sekretariat menjalankan Fungsi Koordinasi secara Intensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan melakukan konsultasi dengan OPD di Kabupaten untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Tabel 2.10
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Kebomas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1	S2	6
2	S1	32
3	D4	-
4	D3	1
5	SLTA	11
6	SLTP	-
	TOTAL	50

Kondisi Kepegawaian Kecamatan Kebomas berdasarkan tingkat golongan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.9. Kapasitas dan Kapabilitas Karyawan berkaitan erat dengan tingkat Pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan

pada tabel 2.10, tingkat Pendidikan Karyawan Kecamatan yang paling banyak adalah Lulusan S1. Secara Normatif merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan Kinerja Kecamatan secara umum. Jumlah Karyawan yang menamatkan Pendidikan S2 sebanyak 6 (enam) orang, S1 tercatat 32 (tiga puluh dua) orang, D3 sebanyak 1 (satu) orang, SMA sebanyak 11 (sebelas) orang, ini juga menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Kondisi sarana dan prasarana

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja secara lengkap

jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Kebomas pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.11
Jumlah Aset Kantor Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
pada periode 31 Desember 2024

No.	Kelompok Aset	Nilai Total Aset (Rp.)	Aset yang tidak Digunakan		Ket
		Urusan	Urusan	Urusan	
1.	Tanah	55.916.857.429,00	-	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	5.954.724.987,13	-	-	-
3.	Gedung dan Bangunan	5.288.599.918,60	-	-	-
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.555.003.795,80	-	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	2.400.000	-	-	-
6.	Aset Lain-lain	315.785.582	-	-	-
	Jumlah Aset	63.987.999.485,66	-	-	-

Tabel 2.12
Kondisi Sarana dan Prasarana pada Kecamatan Kebomas Kab.
Gresik :

No.	Sarana dan prasarana yang digunakan	Jumlah	Kondisi			Ket
			Lengkap	Kurang	Mencukupi	
1.	Ruang Kerja	7	-	-	√	
2.	Meja/Kursi Kerja	30	-	-	√	
3.	Komputer	17	-	-	√	
4.	Kendaraan Operasional Roda 4	2	-	-	√	
5.	Kendaraan Operasional Roda 2	2	-	-	√	

Sarana dan prasarana di Kecamatan Kebomas dan 10 kelurahan secara umum dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya meskipun ada beberapa sarana dan prasarana dalam kondisi rusak dan rusak berat sehingga memerlukan penggantian sarana dan prasarana. Secara umum kuantitasnya masih kurang dan masih diperlukan untuk penambahan sarana dan prasarana untuk 5 tahun ke depan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebomas

Kinerja pelayanan merupakan rencana yang nantinya akan dijadikan acuan untuk melaksanakan program-program di Kecamatan selama periode satu tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Kecamatan Kebomas menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal

kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Kebomas dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rasio capaian 100% selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Kebomas berhasil direalisasikan dengan efektif. Beberapa poin penting dari analisis :

- IKM Kecamatan terus meningkat dari 82,63 (2022) menjadi 87,84 (2024), dengan capaian 95,45% pada tahun 2024.
- Jumlah fasilitasi dan koordinasi, serta inovasi pelayanan menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan. Berdasarkan data anggaran dan realisasi tiga program utama Kecamatan Kebomas dari tahun 2020 hingga 2024.

Adapun penilaian capaian Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2020-2024 sesuai dengan Sasaran dan indikator Kinerja RPJMD disajikan dalam Tabel 2.13 dan capaian kinerja

pelayanan Kecamatan Kebomas dapat dilihat pada tabel 2.14 dibawah ini :

Tabel 2.13

INDIKATOR KINERJA RPJMD DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perang Daerah Tahun ke - (%)					Realisasi Capaian Tahun ke - (%)					Rasio Capaian pada Tahun ke - (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	90	90	91	91,5	92	91,3	90,75	82,63	91,5	87,84	101,4	100,8	90,8	100	95,48



Tabel 2.14
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

No.	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	√																			
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan		√	√			90	91	91,5	92	92,5	91,3	90,75	82,63	91,5	87,84	101,4	100,8	90,8	100	95,48
3	Persentase ketercapaian sasaran program OPD			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan			√			5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			√			2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			√			-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	100%	100%	100%
7	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			√			-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	100%	100%	100%
8	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			√			15 Buku	15 Buku	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	15 Buku	15 Buku	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9	Jumlah Dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan			√			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			√			12 Bulan	12 Bulan	62 Orang/Bulan	62 Orang/Bulan	62 Orang/Bulan	12 Bulan	12 Bulan	62 Orang/Bulan	62 Orang/Bulan	62 Orang/Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			√			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan			√			2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	100%	100%	100%	100%
13	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			√			100 Orang	100 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	100 Orang	100 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
14	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			√			30 Orang	30 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	30 Orang	30 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
15	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah			√			5 Rekening	5 Rekening	100	100	100	5 Rekening	5 Rekening	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
16	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			√			44 Jenis	44 Jenis	20 Paket	20 Paket	20 Paket	44 Jenis	44 Jenis	20 Paket	20 Paket	20 Paket	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			√			3 Jenis	3 Jenis	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Jenis	3 Jenis	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
18	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			√			1 Jenis	1 Jenis	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Jenis	1 Jenis	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
19	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			√			3 Jenis	3 Jenis	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Jenis	3 Jenis	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
20	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			√			2 Jenis	2 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Jenis	2 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
21	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah			√			3 Jenis	3 Jenis	100	100	100	3 Jenis	3 Jenis	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			√			12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			√			3 Jenis	3 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Jenis	3 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			√			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
25	Jumlah Barang dan Aset Milik Daerah yang terpelihara			√			5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	100%	100%	100%	100%
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			√			2 Unit R4/2 Unit R2	2 Unit R4/2 Unit R2	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit R4/2 Unit R2	2 Unit R4/2 Unit R2	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
27	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			√			3 Jenis	3 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	3 Jenis	3 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
28	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			√			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
29	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik			√			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%
30	Jumlah Kelurahan yang menerapkan SPM			√			85	10 Kelurahan	10 Kelurahan	10 Kelurahan	10 Kelurahan	85	10 Kelurahan	10 Kelurahan	10 Kelurahan	10 Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
31	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			√			85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
32	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			√			85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
33	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			√			85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
34	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			√			85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
35	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			√			85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
36	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			√			85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
37	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			√			85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
38	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			√			85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
39	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			√			85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
40	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			√			85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	85	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
41	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			√			0	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	16 Jenis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
42	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
44	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
45	Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			√			21 Des/Kel	21 Des/Kel	21 Des/Kel	21 Des/Kel	21 Des/Kel	21 Des/Kel	21 Des/Kel	21 Des/Kel	21 Des/Kel	21 Des/Kel	100%	100%	100%	100%	100%
47	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			√			80 Orang	120 Orang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80 Orang	120 Orang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
48	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Kebomas			√			10 Kel	10 Kel	10 Kel	10 Kel	10 Kel	10 Kel	10 Kel	10 Kel	10 Kel	10 Kel	100%	100%	100%	100%	100%
49	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			√			5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
50	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			√			5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
51	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			√			5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
52	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			√			5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
53	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			√			5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
54	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			√			5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
55	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			√			5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
56	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			√			5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
57	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			√			5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
58	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			√			5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	5 Jenis	7 Jenis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
59	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			√			5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	100%	100%	100%	100%	100%
60	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			√			5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	100%	100%	100%	100%	100%
61	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			√			5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	100%	100%	100%	100%	100%
62	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			√			5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	100%	100%	100%	100%	100%
63	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			√			5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
64	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			√			5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	100%	100%	100%	100%	100%
65	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			√			5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	100%	100%	100%	100%	100%
66	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			√			5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	100%	100%	100%	100%	100%
67	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			√			5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	100%	100%	100%	100%	100%
68	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			√			5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	5 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	4 Pok/Orm	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
69	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
70	Jumah Penanganan Konflik di Kecamatan			√			24 Kali	25 Kali	26 Kali	27 Kali	28 Kali	24 Kali	25 Kali	26 Kali	27 Kali	28 Kali	100%	100%	100%	100%	100%
71	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			√			12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
72	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan penegakan perda dan perkara			√			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
73	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik			√			12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
74	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
75	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
76	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina			√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
77	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			√			-	21 Kali	100	100	100	-	21 Kali	100	100	100	-	100%	100%	100%	100%
78	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			√			11 Desa	11 Desa	11Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Desa	11 Desa	11Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
79	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			√			-	44 Orang	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	-	44 Orang	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	-	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
80	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			√			-	4 Desa	1 Dok	0	1 Dok	-	4 Desa	1 Dok	0	1 Dok	-	100%	100%	100%	100%
81	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			√			-	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	-	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	-	100%	100%	100%	100%
82	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			√			100	100	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100	100	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
83	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			√			-	11 Desa	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	11 Desa	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	100%	100%	100%	100%
84	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			√			12 Bulan	12 Bulan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	12 Bulan	12 Bulan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
85	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			√			21 Des/Kel	21 Des/Kel	11 Lap	11 Lap	11 Lap	21 Des/Kel	21 Des/Kel	11 Lap	11 Lap	11 Lap	100%	100%	100%	100%	100%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Kebomas

1. Masyarakat Umum

- a. Penduduk Kecamatan Kebomas secara keseluruhan
- b. Penerima layanan administrasi kependudukan (surat keterangan domisili, pengantar KTP, KK, akta, dll.)
- c. Warga yang membutuhkan pelayanan legalisasi surat dan dokumen

2. Pemerintahan Desa/Kelurahan

- a. Lurah dan perangkat kelurahan se-Kecamatan Kebomas
- b. RT/RW dan lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan
- c. Aparatur dalam hal fasilitasi pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan Masyarakat.

3. Pelaku Usaha dan Ekonomi Lokal

- a. UMKM, koperasi, pedagang, serta pelaku usaha lainnya
- b. Investor atau pihak swasta yang memerlukan fasilitasi perizinan dan pengembangan usaha di wilayah kecamatan

4. Kelompok Masyarakat Rentan

- a. Lansia, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin
- b. Penerima program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat

5. Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan

- a. Majelis taklim, karang taruna, PKK, organisasi pemuda, dan lembaga sosial lainnya
- b. Penerima pembinaan, fasilitasi kegiatan, serta dukungan pemberdayaan sosial dan budaya

6. Instansi Pemerintah dan Lembaga Lainnya

- a. OPD Kabupaten Gresik yang berkoordinasi dengan kecamatan

- b. TNI/Polri, BUMN/BUMD, serta lembaga vertikal di wilayah Kecamatan Kebomas
- c. Sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan yang memerlukan koordinasi pemerintahan

2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kebomas

Berikut kami jabarkan identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kebomas :

1. Terbatasnya jumlah Aparat/Pegawai di kecamatan, bila dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan, Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan, desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing - masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan , Desa dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang ;
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat Akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa dan kecamatan;

6. Kurangnya perhatian Pemerintah kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan desa;
7. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten. Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Kebomas dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Desa dalam pelayanan kepada Masyarakat.
- b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW dan Lembaga lainnya yang ada di Desa.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban.

3. Seksi Pembangunan

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa ;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
- c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah.
- b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

- c. Masih tingginya tingkat pengangguran.
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Desa
- 5. Seksi Ekonomi
 - a. Kurangnya pemanfaatan media dalam melaksanakan usaha perekonomian
 - b. Keterbatasan modal dan sarana prasarana untuk kegiatan usaha ekonomi khususnya badan usaha milik desa
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan ketrampilan bagi pelaku usaha ekonomi dan pengurus koperasi yang ada belum maksimal dan belum ikut semua.
- 6. Kelurahan
 - a. Jumlah SDM di kelurahan yang masih ada kekosongan jabatan dikarenakan banyaknya ASN yang sudah purna/memasuki masa akhir jabatan.
 - b. Kurangnya pengetahuan ASN di kelurahan terkait pengelolaan Dana Kelurahan.

2.2.2 Isu Strategis Pada Kecamatan Kebomas

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Gresik, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian Kecamatan Kebomas selama periode 2025–2029. Isu-isu tersebut mencerminkan tantangan dan kebutuhan strategis yang muncul dari dinamika global, nasional, regional, maupun kondisi lokal wilayah Kecamatan Kebomas.

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan

Masih ditemukannya permasalahan terkait jumlah dan kompetensi aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, menuntut adanya upaya

penguatan kapasitas aparatur dan sistem tata kelola pemerintahan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan kecamatan yang profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Penguatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Pelayanan publik di tingkat kecamatan masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan fasilitas pelayanan publik, baik secara fisik maupun digital, guna mendukung terwujudnya pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi pelayanan publik menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan bagi masyarakat.

3. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya memperkuat peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pembangunan, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam perencanaan dan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan pemerintah desa/kelurahan menjadi aspek penting dalam memperkuat sinergi pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan lokal serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

4. Penguatan Kelembagaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat

Kecamatan Kebomas memiliki potensi sosial dan ekonomi yang cukup besar, termasuk keberadaan BUMDes, UMKM, serta lembaga kemasyarakatan. Namun demikian,

potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Isu strategis yang perlu diperhatikan adalah penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.

5. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Ketahanan Wilayah

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi menimbulkan tantangan terhadap kualitas lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta memperkuat kolaborasi dengan pihak terkait untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan yang sehat di Kecamatan Kebomas.

6. Penguatan Sinergi Pembangunan Desa dan Kelurahan

Kecamatan berperan penting dalam mengoordinasikan pembangunan di wilayah desa dan kelurahan. Diperlukan strategi untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah, meningkatkan keselarasan program prioritas daerah dengan kegiatan di tingkat desa/kelurahan, serta memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan sebagai mitra utama kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Tabel 2.15 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Kebomas

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Aparatur kecamatan, desa, dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan	Terbatasnya jumlah pegawai, kompetensi belum optimal, kinerja aparatur masih rendah	Kualitas SDM aparatur	Tuntutan reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik	Reformasi birokrasi & SPBE	Kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan di Kab. Gresik	Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kinerja aparatur kecamatan, desa, dan kelurahan
Potensi sarana prasarana pelayanan publik di kecamatan dan desa Sarana dan prasarana pelayanan publik	Fasilitas kantor & infrastruktur pelayanan belum memadai	Akses dan kualitas pelayanan publik	Inovasi teknologi pelayanan	Transformasi pelayanan publik digital	Kebutuhan pelayanan cepat di wilayah perkotaan dan perdesaan	Penguatan sarana prasarana dan teknologi pelayanan publik
Potensi lembaga kemasyarakatan (RT/RW, Karang Taruna, PKK)	Pemberdayaan masih terbatas, koordinasi kelembagaan lemah	Pemberdayaan masyarakat & partisipasi sosial	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan	SDGs Desa, pemberdayaan masyarakat	Kekuatan gotong royong masyarakat Kab. Gresik	Penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Potensi pembangunan wilayah desa dan kelurahan	Pemerataan pembangunan belum optimal, infrastruktur rusak, pengelolaan sampah belum maksimal	Kualitas lingkungan dan infrastruktur	Isu perubahan iklim, keberlanjutan infrastruktur hijau	Program pembangunan desa berkelanjutan	Peningkatan infrastruktur dasar di Kab. Gresik	Peningkatan pemerataan pembangunan & pengelolaan lingkungan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi sosial & kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan rendah, angka kemiskinan tinggi, pengangguran banyak, kesadaran hukum rendah	Kesejahteraan sosial & ketentraman	Agenda SDGs (pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan)	Program perlindungan sosial & ketenagakerjaan	Penanganan kemiskinan dan PMKS di Gresik	Peningkatan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, & kesadaran hukum masyarakat
Ekonomi lokal (UMKM, BUMDes, koperasi)	Modal terbatas, sarpras usaha kurang, pembinaan belum optimal	Peningkatan ekonomi lokal	Persaingan pasar bebas, digitalisasi ekonomi	Program pemulihan ekonomi, pemberdayaan UMKM	Dukungan terhadap UMKM dan BUMDes	Penguatan ekonomi masyarakat desa dan UMKM
Potensi kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan perkotaan	Kekurangan SDM, kurangnya pengetahuan terkait pengelolaan Dana Kelurahan	Tata kelola kelurahan	Urban governance	Program penguatan kelurahan	Kebutuhan pelayanan kelurahan di wilayah perkotaan Gresik	Penguatan kapasitas kelurahan dan pengelolaan Dana Kelurahan

- 1) Reformasi Birokrasi atau penataan Sumber Daya Manusia
Dalam rangka Pelayanan yang prima langkah strategis yang ditetapkan OPD Kecamatan Kebomas adalah :
 - a. Menyiapkan petugas pelayanan yang terampil.
 - b. Memberikan kesempatan petugas pelayanan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
 - c. Mendorong untuk bekerja yang profesional dengan memberikan penghargaan bagi bagi petugas yang disiplin dan berprestasi serta memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana
Untuk menunjang Pelayanan yang baik diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut :
 - a. Menyediakan tempat pelayanan yang mudah didapat oleh Pelanggan.
 - b. Menyediakan papan informasi mengenai mekanisme atau tata cara dan prosedur pelayanan.
 - c. Melengkapi perangkat dan peralatan yang canggih untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan.
 - d. Menyediakan pengaduan masyarakat, melalui media elektronik (web, media sosial, email, Telephon, faximile)
- 3) Upaya – upaya lain yang perlu dilakukan
 - a. Sosialisasi dan memberikan informasi kepada msyarakat setiap ada kegiatan dan pertemuan warga mengenai sistem pelayanan di Kecamatan Kebomas.
 - b. Memberikan informasi dan penekanan kepada Kepala Desa melalui konperensi untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pelayanan di tingkat Desa/Kelurahan.
 - c. Menyederhanakan prosedur pelayanan dengan tetap mengedepankan aturan yang telah ditetapkan.
 - d. Menanggapi setiap ada pengaduan masyarakat 1 kali 24 jam untuk segera diselesaikan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama Pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, Pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Gresik dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan. Kecamatan Kebomas menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I, III dan IV RPJMD Kabupaten Gresik

Tahun 2025-2029, yaitu: ***“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas”***.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kebomas, dalam hal ini Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik dapat tercapai.

3.1.2 Sasaran Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Kecamatan Kebomas Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam RPJMD 2025–2029. Sasaran utama pembangunan Kecamatan Kebomas diarahkan untuk meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, dan meningkatkan keselarasan Pembangunan prioritas daerah di tingkat Desa/Kelurahan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas menetapkan sasaran pembangunan pada periode 2025–2029 yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan keselarasan pembangunan wilayah.

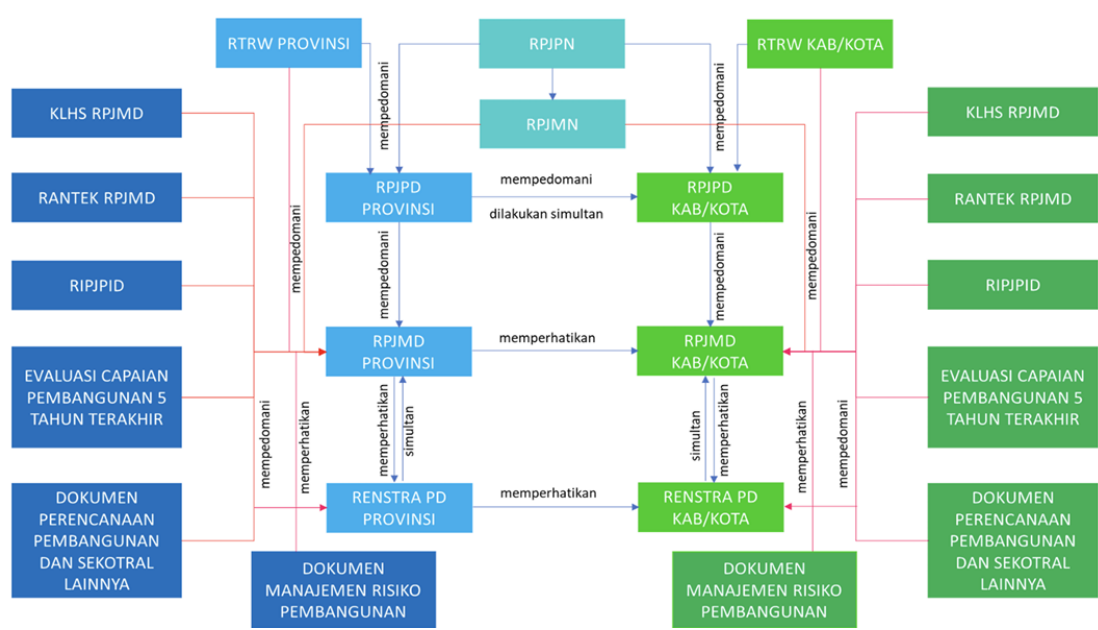
1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran ini diarahkan untuk menciptakan birokrasi kecamatan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta mendorong budaya kerja yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, Kecamatan Kebomas diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan adil kepada seluruh warga.

2. Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan

Sasaran ini bertujuan memperkuat sinergi antara kebijakan pembangunan kabupaten dengan program pembangunan desa dan kelurahan. Kecamatan berperan sebagai penghubung, fasilitator, dan pengawal agar prioritas pembangunan daerah dapat diimplementasikan secara nyata di tingkat desa/kelurahan. Melalui koordinasi, pendampingan, serta penguatan perencanaan partisipatif, pembangunan di Kecamatan Kebomas akan berjalan lebih terarah, selaras, dan berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dua sasaran tersebut, Kecamatan Kebomas menegaskan komitmennya untuk menjadi wilayah yang tertata, adaptif, serta mampu menggerakkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029.



Gambar 4
Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Teknik Perumusan

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran, digunakan beberapa teknik berikut:

1. Analisis Kondisi Eksisting

Identifikasi permasalahan tata kelola pemerintahan kecamatan dan keselarasan pembangunan antarwilayah.

2. Sinkronisasi dengan Dokumen Perencanaan

Menyesuaikan tujuan kecamatan dengan visi, misi, dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029.

3. Penetapan Tujuan Strategis

Menetapkan tujuan umum (*goals*) yang berorientasi pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

4. Perumusan Sasaran Terukur

Mengurai tujuan ke dalam sasaran yang lebih spesifik, fokus, dan dapat diukur melalui indikator kinerja utama.

5. Keterlibatan Stakeholder

Melibatkan aparatur, pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan pihak terkait untuk memastikan tujuan dan sasaran realistis dan partisipatif.

Dengan teknik ini, tujuan besar berupa ***“Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas”*** dapat dicapai secara sistematis melalui sasaran yang terukur, realistis, dan selaras dengan pembangunan daerah.

Teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kebomas dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPKMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TUJUAN						Keterangan
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun)			√	13.99	14.01	14.08	14.17	14.23	14.27	
Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa			Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)			√	74.57	74.82	75.08	75.33	75.59	75.84	
Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah			Indeks Ketimpangan Gender (Angkat)			√	91.06-91.26	91.11-91.51	91.16-91.76	91.21-92.01	91.26-92.26	91.31-92.51	
Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar Kesehatan			Rasio Government Expenditure (%)			√	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	

NSPK DAN SASARAN RPKMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TUJUAN						Keterangan
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	-	-	√	132.58	129.42	126.42	123.55	120.79	117.17	
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar Pendidikan			Indeks Perlindungan Anak (%)	-	-	√	71.62-72.00	71.67-75.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	
Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	-	-	√	2.25	2.51	2.75	3.01	3.25	3.51	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	√	√	-	88	88.5	89	89.5	90	90.5	

NSPK DAN SASARAN RPKMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TUJUAN						Keteranga n
							202 5	202 6	2027	202 8	202 9	203 0	
		Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di tingkat Desa/Kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Belanja Infrastruktur di Desa	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

NSPK DAN SASARAN RPKMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TUJUAN						Keteranga n
							202 5	202 6	2027	202 8	202 9	203 0	
			Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	



3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan tujuan “Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas” serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan, Kecamatan Kebomas menetapkan sejumlah strategi yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah.

Strategi yang dikembangkan selama periode 2025–2029 meliputi:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Kecamatan

Upaya ini diarahkan pada peningkatan kemampuan aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi berbasis kinerja. Selain itu, diterapkan sistem kerja yang profesional, adaptif, dan akuntabel guna mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Kecamatan Kebomas.

2. Penguatan Tata Kelola dan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital

Untuk mendukung pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efektif, Kecamatan Kebomas mengembangkan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi serta memperluas digitalisasi administrasi pemerintahan. Transformasi digital ini juga diharapkan mampu meningkatkan akurasi data dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

3. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Strategi ini dilaksanakan melalui penyempurnaan mekanisme perencanaan partisipatif, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengendalian dan evaluasi program pembangunan. Dengan demikian, kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan dapat lebih

terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik.

4. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pembangunan Desa/Kelurahan

Kecamatan berperan penting dalam mengoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa/kelurahan. Melalui penguatan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan, diharapkan tercipta keselarasan kebijakan dan keberlanjutan program prioritas di wilayah Kecamatan Kebomas.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan Sosial-Ekonomi

Kecamatan mendorong penguatan potensi ekonomi lokal, pengembangan UMKM, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, budaya, dan lingkungan. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian masyarakat dan menumbuhkan kolaborasi antar unsur masyarakat dalam mendukung pembangunan wilayah.

6. Penguatan Pengelolaan Lingkungan dan Ketahanan Wilayah

Melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, Kecamatan Kebomas berupaya mewujudkan wilayah yang berketahanan, sehat, dan berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek tata ruang, mitigasi bencana, dan keberlanjutan sumber daya alam.

7. Penguatan Sistem Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Kebomas mengembangkan sistem kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta memperkuat koordinasi internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Kebomas

TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4	TAHAP 5
2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Penguatan tata kelola pemerintahan kecamatan berbasis digital - Fasilitasi penyusunan RPJMDesa & RKPDesa selaras RPJMD - Pemetaan kebutuhan layanan pendidikan & kesehatan - Peningkatan kapasitas perangkat desa/kelurahan	- Peningkatan kualitas layanan dasar kesehatan & pendidikan - Pendampingan perlindungan anak & pemberdayaan perempuan - Koordinasi pembangunan infrastruktur desa - Inovasi layanan publik kelurahan	- Peningkatan inklusi sosial & pemberdayaan masyarakat desa - Optimalisasi belanja desa sektor prioritas - Fasilitasi pembinaan BUMDes & ekonomi kreatif - Evaluasi keselarasan pembangunan desa dengan RPJMD	- Akselerasi target IPM, IPG, IDG desa/kelurahan - Koordinasi penanganan stunting, kemiskinan, pengangguran - Pengembangan desa digital & data pembangunan - Monitoring & evaluasi pembangunan partisipatif	- Konsolidasi capaian pembangunan kecamatan & desa - Penuntasan target IKD & IKK RPJMD Kabupaten - Penyusunan dokumen evaluasi renstra kecamatan - Penguatan keberlanjutan program unggulan desa berbasis inklusi sosial

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan daerah serta mewujudkan tujuan “*Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas*”, Kecamatan Kebomas menetapkan arah kebijakan strategis yang berorientasi pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan penguatan peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat desa/kelurahan. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam dua sasaran utama sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

- Mendorong peningkatan kapasitas aparaturnya kecamatan melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi berbasis digital.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan percepatan layanan publik.
- Memperkuat sistem koordinasi, monitoring, dan evaluasi internal agar pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan lebih efektif dan tepat sasaran.
- Membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan

- Memperkuat peran koordinasi kecamatan dalam menyinergikan program pembangunan desa/kelurahan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan agar tercipta program yang inklusif dan berkelanjutan.
- Menjalin kemitraan strategis dengan lembaga desa/kelurahan, organisasi masyarakat, serta stakeholder terkait untuk mempercepat pencapaian target pembangunan.
- Melakukan pembinaan, fasilitasi, dan supervisi kepada pemerintah desa/kelurahan agar mampu melaksanakan pembangunan yang sejalan dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029.

Melalui arah kebijakan tersebut, Kecamatan Kebomas berkomitmen untuk memperkuat perannya sebagai perangkat daerah yang tidak hanya menyelenggarakan urusan

pemerintahan secara administratif, tetapi juga menjadi penghubung yang strategis antara pemerintah kabupaten dengan desa/kelurahan. Dengan demikian, tujuan besar yaitu *“Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas”* dapat diwujudkan melalui pemerintahan yang transparan, responsif, serta pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Secara lebih rinci, Teknik perumusan arah kebijakan Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029 dituangkan dalam berikut ini :

Tabel 3.3 Teknik Perumusan Arah Kebijakan Renstra

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra OPD (Kecamatan Kebomas)	Ket.
1	Peningkatan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel	Penguatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan, penerapan sistem digitalisasi layanan, serta peningkatan budaya kerja berintegritas	Mendukung sasaran 1
2	Sinergi perencanaan pembangunan desa/kelurahan dengan RPJMD	Peningkatan sinkronisasi dan kolaborasi pembangunan lintas wilayah dan desa/kelurahan	Fasilitasi, pembinaan, dan supervisi pembangunan desa/kelurahan agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah	Mendukung sasaran 2
3	Pelayanan publik berbasis standar pelayanan minimal (SPM)	Peningkatan kualitas layanan publik yang merata dan responsif	Optimalisasi pelayanan administrasi pemerintahan di kecamatan sesuai SPM	Mendukung tujuan utama
4	Penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi	Penguatan kelembagaan dan peran perangkat daerah dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan	Peningkatan fungsi kecamatan sebagai koordinator pembangunan wilayah serta pelaksana monitoring program desa/kelurahan	Cross-cutting

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

A. Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Kebomas ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Kebomas adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak

dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi, serta kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat lokal. Melalui program ini, Kecamatan Kebomas berperan sebagai fasilitator dan koordinator agar desa dan kelurahan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta menyesuaikan arah pembangunan dengan kebijakan prioritas daerah.

d. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dimaksudkan sebagai upaya pemerintah kecamatan untuk menjaga stabilitas sosial, keamanan lingkungan, serta menciptakan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, dan kondusif. Kecamatan berperan sebagai simpul koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, desa/kelurahan, dan masyarakat dalam menangani berbagai potensi gangguan ketertiban umum serta menjaga harmoni sosial di wilayah.

e. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah program yang dilaksanakan pemerintah kecamatan dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

B. Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan dalam Renstra adalah penjelasan lebih rinci dari program yang sudah ditetapkan, berupa gambaran apa saja

aktivitas yang dilakukan oleh kecamatan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan arah kebijakan. Uraian kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kebomas merupakan penjabaran dari program-program strategis yang diarahkan untuk mencapai sasaran :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan.

Uraian Kegiatan Kecamatan Kebomas terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tujuan: memastikan fungsi kecamatan berjalan optimal sebagai perangkat daerah penunjang pemerintah kabupaten.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
8. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
9. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
10. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
11. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
13. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

C. Uraian Sub Kegiatan

Sub kegiatan di Kecamatan Kebomas merupakan rincian aktivitas teknis dan operasional yang dilaksanakan oleh kecamatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sub kegiatan ini menjadi bagian terkecil dari program dan kegiatan, yang pelaksanaannya langsung menyentuh kebutuhan masyarakat maupun mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Dalam Renstra 2025–2029, sub kegiatan Kecamatan Kebomas diarahkan untuk menghasilkan output yang jelas dan terukur, seperti dokumen, layanan publik, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, pada program ***Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***, sub kegiatan dapat berupa pelayanan administrasi kependudukan, penerbitan surat keterangan, penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat, hingga pelayanan keliling ke desa/kelurahan.

Selain itu, pada program ***Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan***, sub kegiatan dapat berupa fasilitasi musrenbang desa/kelurahan, pembinaan lembaga kemasyarakatan seperti LPM, PKK, dan Karang Taruna, serta kegiatan peningkatan kapasitas ekonomi lokal. Sedangkan dalam program ***Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum***, sub kegiatan mencakup pembinaan Linmas, sosialisasi ketertiban umum, hingga deteksi dini potensi konflik atau bencana.

Dengan demikian, sub kegiatan di Kecamatan Kebomas adalah bentuk nyata dan langsung dari peran kecamatan dalam :

1. Memberikan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas.
2. Membina desa/kelurahan agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
3. Menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan wilayah.
4. Memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan partisipatif dalam Pembangunan.

Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN KEBOMAS							
• Meningkatkan kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan • Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah • Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah • Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa • Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif • Meningkatnya kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan • Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
					Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun)		
					Indeks Ketimpangan Gender (Angka)		
					Rasio Government Expenditure (%)		
					Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
					Indeks Perlindungan Anak (%)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Kebomas			Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	7.01.01.2.01.0002 dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	7.01.01.2.01.0004 dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7.01.01.2.01.0006 dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 Kinerja Perangkat Daerah D	
				Jumlah Dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Keuangan Perangkat	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Keuangan Perangkat	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumber daya Aparatur di Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05.0005 - Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Teknis Implementasi Peraturan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Barang dan Aset Milik Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 – Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.002 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
					meningkatnya layanan publik kecamatan Kebomas	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)		7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah desa/kelurahan ditingkat				Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)		
						Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(0)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		
					Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		
				Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Kebomas	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					1. Jumlah Usulan kegiatan perencanaan pembangunan pada Desa dan Kelurahan 2. Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi	7.01.03.2.03 - Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	7.01.03.2.03.0004 - Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Jumah Penanganan Konflik di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil inergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Jumlah pelaksanaan koordinasi dan penegakan perda dan perkara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	
			Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Kebomas		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.01.06.2.01.0007 - Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi dan Pemberhentian Perangkat Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0016 - Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Pendampingan Desa di Wilayahnya	



4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan merupakan bagian penting dalam dokumen Renstra Kecamatan, karena menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh Kecamatan Kebomas selama periode perencanaan, bagaimana bentuk implementasinya, serta berapa kebutuhan sumber daya yang diperlukan.

1. Rencana Program

Program adalah arah kebijakan strategis kecamatan yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program ini berfungsi sebagai payung besar yang mengorganisasikan kegiatan-kegiatan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan.

2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah penjabaran dari program yang lebih fokus pada pencapaian hasil tertentu. Kegiatan bersifat operasional dan menjadi jembatan antara tujuan program dengan pelaksanaan teknis di lapangan.

3. Rencana Sub Kegiatan

Sub kegiatan adalah rincian teknis dari kegiatan, berupa aktivitas nyata yang dilaksanakan oleh kecamatan dengan output yang terukur, dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, dan langsung memberi manfaat bagi masyarakat.

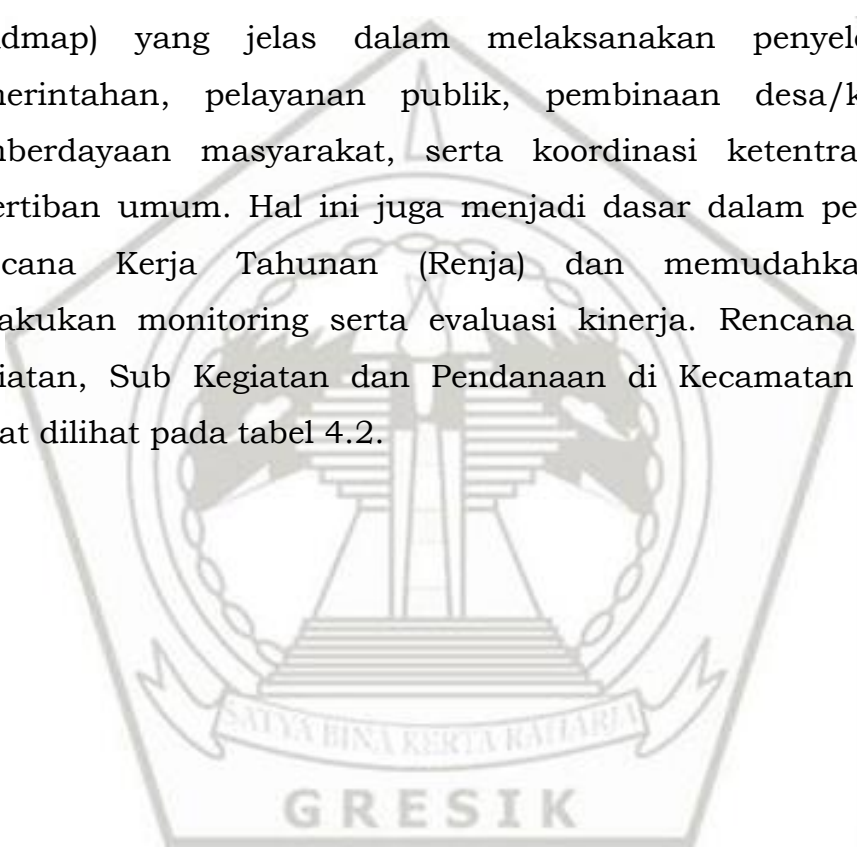
4. Rencana Pendanaan

Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan membutuhkan pendanaan yang disusun berdasarkan perkiraan kebutuhan anggaran selama periode lima tahun. Pendanaan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan hingga Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan perangkat daerah. Rencana tersebut disusun sebagai pedoman awal dalam

penyusunan **Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tahun 2030**, dengan tetap mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, penyusunan program dan kegiatan Tahun 2030 berfungsi untuk menjamin keterpaduan antara pelaksanaan Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025–2029 dengan arah perencanaan jangka menengah berikutnya, hingga ditetapkan **Peraturan Bupati Gresik tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030–2034**.

Dengan adanya rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan, maka Kecamatan Kebomas memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan desa/kelurahan, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan memudahkan dalam melakukan monitoring serta evaluasi kinerja. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan di Kecamatan Kebomas dapat dilihat pada tabel 4.2.



TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	15
7.01 - KECAMATAN				18.470.822.000,00		19.018.624.000,00		19.717.013.000,00		20.704.778.000,00		21.336.868.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.322.247.000,00		12.687.696.000,00		13.153.606.000,00		13.812.563.000,00		14.234.243.000,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Kebomas	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	12.322.247.000,00	100	12.687.696.000,00	100	13.153.606.000,00	100	13.812.563.000,00	100	14.234.243.000,00	7.01.0.00.0.00.02.00 - KECAMATAN KEBOMAS	-
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.881.000,00		27.641.000,00		28.641.000,00		28.641.000,00		28.640.900,00		-
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	21.881.000,00	2	27.641.000,00	2	28.641.000,00	2	28.641.000,00	2	28.640.900,00		-
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	12		12		12		12		12			-
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		-		1			-
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			-
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.710.000,00		5.150.000,00		5.150.000,00		5.150.000,00		5.150.000,00		-
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	3.710.000,00	1	5.150.000,00	1	5.150.000,00		5.150.000,00	1	5.150.000,00		-
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.648.800,00		5.088.800,00		5.088.800,00		5.088.800,00		5.088.800,00		-
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.648.800,00	1	5.088.800,00	1	5.088.800,00	1	5.088.800,00	1	5.088.800,00		-
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.661.000,00		5.101.000,00		5.101.000,00		5.101.000,00		5.101.000,00		-
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.661.000,00	1	5.101.000,00	1	5.101.000,00	1	5.101.000,00	1	5.101.000,00		-
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.661.200,00		5.101.200,00		5.101.200,00		5.101.200,00		5.101.100,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	KET
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	3.661.200,00	2	5.101.200,00	2	5.101.200,00	2	5.101.200,00	2	5.101.100,00		-
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.200.000,00		7.200.000,00		8.200.000,00		8.200.000,00		8.200.000,00		-
Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumber daya Aparatur di Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	7.030.500,00	1	7.030.500,00	1	11.030.500,00	1	11.030.500,00	1	11.030.500,00		-
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25	25		25		25		25		25			-
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3.793.200,00		3.793.200,00		5.793.200,00		5.793.200,00		5.793.200,00		-
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	3.793.200,00	1	3.793.200,00	1	5.793.200,00	1	5.793.200,00	1	5.793.200,00		-
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3.237.300,00		3.237.300,00		5.237.300,00		5.237.300,00		5.237.300,00		-
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Undangan (Orang)	25	25	3.237.300,00	25	3.237.300,00	25	5.237.300,00	25	5.237.300,00	25	5.237.300,00		-
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				225.490.000,00		225.490.000,00		270.490.000,00		300.490.000,00		338.490.000,00		-
Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	2	225.490.000,00	2	225.490.000,00	2	270.490.000,00	2	300.490.000,00	2	338.490.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT	KET
			2026		2027		2028		2029		2030		DAERAH	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	4		4		4		4		4			-
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		-			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	48.000.000,00	3	48.000.000,00	3	58.000.000,00	3	68.000.000,00	3	70.000.000,00		-
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		-
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00		-
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.200.000,00		3.200.000,00		3.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00		-
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	3.200.000,00	2	3.200.000,00	2	3.200.000,00	2	4.200.000,00	2	4.200.000,00		-
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47.490.000,00		47.490.000,00		67.490.000,00		67.490.000,00		87.490.000,00		-
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	47.490.000,00	1	47.490.000,00	1	67.490.000,00	1	67.490.000,00	1	87.490.000,00		-
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		-
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024											PERANGKA T DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	KET
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.226.886.800,00		1.051.686.800,00		1.051.686.900,00		1.162.686.700,00		1.162.686.400,00		-
Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.226.886.800,00	12	1.051.686.800,00	12	1.051.686.900,00	12	1.162.686.700,00	12	1.162.686.400,00		-
Jumlah Barang dan Aset Milik Daerah yang terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4	238.629.200,00	4	313.830.000,00	4	353.830.000,00	4	371.787.200,00	4	388.267.200,00		-
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2		2		2		2				-	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1				-	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				64.740.000,00		64.740.000,00		74.740.000,00		74.740.000,00		74.740.000,00		-
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	64.740.000,00	2	64.740.000,00	2	74.740.000,00	2	74.740.000,00	2	74.740.000,00		-
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.090.000,00		19.090.000,00		19.090.000,00		19.090.000,00		35.570.000,00		-
Terlaksananya emeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4	19.090.000,00	4	19.090.000,00	4	19.090.000,00	4	19.090.000,00	4	35.570.000,00		-
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				154.799.200,00		230.000.000,00		260.000.000,00		277.957.200,00		277.957.200,00		-
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1	154.799.200,00	1	230.000.000,00	1	260.000.000,00	1	277.957.200,00	1	277.957.200,00		-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT	KET
			2026		2027		2028		2029		2030		DAERAH	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	
meningkatkan layanan publik kecamatan Kebomas - Kelurahan Indro	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	150.000.000,00	100	155.000.000,00	100	160.000.000,00	100	168.000.000,00	100	175.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.00 19 - KELURAHAN INDRO	-
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				150.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		168.000.000,00		175.000.000,00		-
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				150.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		168.000.000,00		175.000.000,00		-
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	150.000.000,00	1	155.000.000,00	1	160.000.000,00	1	168.000.000,00	1	175.000.000,00		-
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				150.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		168.000.000,00		175.000.000,00		-
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	150.000.000,00	1	155.000.000,00	1	160.000.000,00	1	168.000.000,00	1	175.000.000,00		
meningkatkan layanan publik kecamatan Kebomas - Kelurahan Ngargosari	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	150.000.000,00	100	155.000.000,00	100	160.000.000,00	100	168.000.000,00	100	175.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.00 22 - KELURAHAN NGARGOSARI	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	KET
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				150.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		168.000.000,00		175.000.000,00		-
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	150.000.000,00	1	155.000.000,00	1	160.000.000,00	1	168.000.000,00	1	175.000.000,00		-
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	150.000.000,00	1	155.000.000,00	1	160.000.000,00	1	168.000.000,00	1	175.000.000,00		-
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				150.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		168.000.000,00		175.000.000,00		-
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	150.000.000,00	1	155.000.000,00	1	160.000.000,00	1	168.000.000,00	1	175.000.000,00		
meningkatnya layanan publik kecamatan Kebomas - Kelurahan Singosari	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	188.429.000,00	100	188.429.000,00	100	188.429.000,00	100	185.000.000,00	100	175.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.00 25 - KELURAHAN SINGOSARI	-
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				188.429.000,00		188.429.000,00		188.429.000,00		185.000.000,00		175.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT	KET
			2026		2027		2028		2029		2030		DAERAH	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	KET
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Fasilitas Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	188.429.000,00	1	188.429.000,00	1	188.429.000,00	1	185.000.000,00	1	175.000.000,00		-
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				188.429.000,00		188.429.000,00		188.429.000,00		185.000.000,00		175.000.000,00		-
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			-
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		-			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			-
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				67.944.000,00		67.944.527,00		87.473.334,00		92.600.000,00		102.600.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	KET
1. Jumlah Usulan kegiatan perencanaan pembangunan pada Desa dan Kelurahan 2. Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	-	1	67.944.000,00	1	67.944.527,00	1	87.473.334,00	1	92.600.000,00	1	102.600.000,00	-	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10		10		10		10		10		-	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	-	1		1		1		1		1		-	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	-	2		2		2		2		2		-	
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				230.040.000,00		300.494.473,00		278.699.666,00		275.271.000,00		273.946.000,00	-	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	-	1	230.040.000,00	1	300.494.473,00	1	278.699.666,00	1	275.271.000,00	1	273.946.000,00	-	
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	KET
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga emasyarakatatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	-	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	22.000.000,00	2	25.000.000,00	2	30.000.000,00		-
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masvarakat				15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		-
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				356.692.750,00		356.692.750,00		376.892.750,00		398.750.000,00		374.898.000,00		-
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan emberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3	3	356.692.750,00	3	356.692.750,00	3	376.892.750,00	3	398.750.000,00	3	374.898.000,00		-
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	-	3				3				3			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		-
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	-	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		-
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				156.692.750,00		156.692.750,00		176.892.750,00		198.750.000,00		174.898.000,00		-
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3	3	156.692.750,00	3	156.692.750,00	3	176.892.750,00	3	198.750.000,00	3	174.898.000,00		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Kebomas - Kelurahan Gulomantung	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100	356.692.750,00	100	356.692.750,00	100	376.892.750,00	100	398.750.000,00	100	374.898.000,00	7.01.0.00.0.00.02.00 18 - KELURAHAN GULOMANTUNG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	KET
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			-
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100							
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		-
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				156.692.750,00		156.692.750,00		176.892.750,00		198.750.000,00		174.898.000,00		-
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3	3	156.692.750,00	3	156.692.750,00	3	176.892.750,00	3	198.750.000,00	3	174.898.000,00		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Kebomas - Kelurahan Indro	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100	356.692.750,00	100	356.692.750,00	100	376.892.750,00	100	398.750.000,00	100	374.898.000,00	7.01.0.00.0.00.02.00 19 - KELURAHAN INDRO	-
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		-			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT	KET
			2026		2027		2028		2029		2030		DAERAH	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	KET
	persentase esa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			-
	persentase esa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		-			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase esa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase esa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase esa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase esa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase esa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			-
	persentase esa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100		-	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				356.692.750,00		356.692.750,00		376.892.750,00		398.750.000,00		374.898.000,00		-
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4	3	356.692.750,00	3	356.692.750,00	3	376.892.750,00	3	398.750.000,00	3	374.898.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	KET
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	3		3		3		3		3			-
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		-
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			-
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			-
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				403.800.000,00		411.065.000,00		424.000.000,00		445.000.000,00		457.000.000,00		-
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4	3	403.800.000,00	3	411.065.000,00	3	424.000.000,00	3	445.000.000,00	3	457.000.000,00		-
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	3		3		3		3		3			-
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		-
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		-
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				203.800.000,00		211.065.000,00		224.000.000,00		245.000.000,00		257.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	KET
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang elaksanakan emberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	3	203.800.000, 00	3	211.065.000, 00	3	224.000.000, 00	3	245.000.000, 00	3	257.000.000, 00		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Kebomas - Kelurahan Ngargosari	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100	403.800.000, 00	100	411.065.000, 00	100	424.000.000, 00	100	445.000.000, 00	100	457.000.000, 00	7.01.0.00.0.00.0 2.00 22 - KELURAHAN NGARGOSARI	-
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang elaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	3		3		3		3		3			-
7.01.03.2.02.0002 – Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				200.000.000, 00		200.000.000, 00		200.000.000, 00		200.000.000, 00		200.000.000, 00		-
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4	3	200.000.000, 00	3	200.000.000, 00	3	200.000.000, 00	3	200.000.000, 00	3	200.000.000, 00		-
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				203.800.000, 00		211.065.000, 00		224.000.000, 00		245.000.000, 00		257.000.000, 00		-
Terlaksananya emberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang pelaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas /Ormas)	4	3	203.800.000, 00	3	211.065.000, 00	3	224.000.000, 00	3	245.000.000, 00	3	257.000.000, 00		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Kebomas - Kelurahan Sidomoro	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100	403.800.000, 00	100	411.065.000, 00	100	424.000.000, 00	100	445.000.000, 00	100	457.000.000, 00	7.01.0.00.0.00.0 2.00 23 - KELURAHAN SIDOMORO	-
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase esa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		-			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	KET
	persentase Desa/ kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			-
	persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		-			
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		203.800.000,00	3	211.065.000,00	3	224.000.000,00	3	245.000.000,00	3	257.000.000,00		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Kebomas - Kelurahan Sidomukti	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100	403.800.000,00	100	411.065.000,00	100	424.000.000,00	100	445.000.000,00	100	457.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.00 24 - KELURAHAN SIDOMUKTI	-
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase Desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		-			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	KET
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			-
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				403.800.000,00		411.065.000,00		424.000.000,00		445.000.000,00		457.000.000,00		-
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			-
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang emberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang enanggulungan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		-			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		-			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				403.800.000,00		411.065.000,00		424.000.000,00		445.000.000,00		457.000.000,00		-
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4	3	403.800.000,00	3	411.065.000,00	3	424.000.000,00	3	445.000.000,00	3	457.000.000,00		-
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	3		3		3		3		-			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	KET
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		-
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				203.800.000,00		211.065.000,00		224.000.000,00		245.000.000,00		257.000.000,00		-
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				403.800.000,00		411.065.000,00		424.000.000,00		445.544.000,00		610.408.000,00		-
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4	3	403.800.000,00	3	411.065.000,00	3	424.000.000,00	3	445.544.000,00	3	610.408.000,00		-
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	3		3		3		3		3			-
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		-
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		-
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				203.800.000,00		211.065.000,00		224.000.000,00		245.544.000,00		410.408.000,00		-
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	3	203.800.000,00	3	211.065.000,00	3	224.000.000,00	3	245.544.000,00	3	410.408.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.235.000,00		103.208.000,00		106.998.000,00		112.358.000,00		115.788.000,00		
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Kebomas	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	100.235.000,00	100	103.208.000,00	100	106.998.000,00	100	112.358.000,00	100	115.788.000,00	7.01.0.00.0.00.02.00 00 - KECAMATAN KEBOMAS	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	KET
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				70.335.800,00		73.308.800,00		77.098.800,00		77.098.600,00		80.528.600,00		-
Jumah Penanganan Konflik di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	70.335.800,00	12	73.308.800,00	12	77.098.800,00	12	77.098.600,00	12	80.528.600,00		-
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				330.587.000,00		340.392.000,00		352.891.000,00		370.570.000,00		381.883.000,00		
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Kebomas	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	330.587.000,00	100	340.392.000,00	100	352.891.000,00	100	370.570.000,00	100	381.883.000,00	7.01.0.00.0.00.02.00 00 - KECAMATAN KEBOMAS	-
	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100	100		100		100		100		-			
	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100					



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	KET
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi				330.587.000,00		340.392.000,00		352.891.000,00		370.570.000,00		381.883.000,00		-
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		-
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	-	11	20.000.000,00	11	20.000.000,00	11	30.000.000,00	11	30.000.000,00	11	30.000.000,00		-
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				20.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		-
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	11	11	20.000.000,00	11	27.000.000,00	11	27.000.000,00	11	27.000.000,00	11	27.000.000,00		-
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				60.350.800,00		60.350.900,00		60.350.400,00		60.350.900,00		60.350.900,00		-
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	11	11	60.350.800,00	11	60.350.900,00	11	60.350.400,00	11	60.350.900,00	11	60.350.900,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10	11	12	13	14	KET
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				20.000.000,00		22.804.500,00		22.804.500,00		25.000.000,00		25.000.000,00		-
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	22.804.500,00	1	22.804.500,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		-



4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas Kecamatan Kebomas merupakan rangkaian aktivitas teknis yang dipilih secara selektif untuk mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029. Sub kegiatan ini difokuskan pada aspek pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, sub kegiatan prioritas menjadi titik operasional yang langsung menyentuh masyarakat, sekaligus memastikan bahwa arah kebijakan di tingkat kabupaten dapat berjalan efektif di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

Dalam kerangka mendukung program prioritas tersebut, Kecamatan Balongpanggang menyusun dan menetapkan daftar subkegiatan prioritas yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dirancang agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas yang disusun oleh Kecamatan Balongpanggang bersifat operasional dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap subkegiatan tidak hanya menjadi instrumen pelaksanaan program kecamatan, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya pencapaian outcome pembangunan daerah.

Untuk memperjelas arah tersebut, berikut disajikan Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029.

Tabel. 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan Mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (One Data, One Portal, And Open Access)	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Kebomas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Kebomas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di tingkat Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Kebomas	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Kebomas	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

4.4 Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Kecamatan Kebomas mengintegrasikan subkegiatan yang relevan dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU). Integrasi ini merupakan upaya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, daerah, hingga kecamatan, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi nyata dalam mendukung arah pembangunan nasional.

Terkait dengan Prioritas Nasional III. Pengembangan Koperasi Sektor Produksi, Kecamatan Kebomas melaksanakan subkegiatan berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. Subkegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat, mendorong tumbuhnya koperasi sektor produksi, serta meningkatkan daya saing usaha ekonomi kerakyatan di wilayah kecamatan.

Selanjutnya, dalam mendukung Prioritas Nasional VI: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa, Kecamatan Kebomas menyelenggarakan subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Subkegiatan ini diproyeksikan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, memastikan keselarasan pembangunan kecamatan dan desa, serta memperkuat tata kelola pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Untuk memperjelas bentuk kontribusi kecamatan terhadap pencapaian Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029, berikut disajikan Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (Kpu) Dalam RPJMN Tahun 2025-2029
Kecamatan Kebomas

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 3											
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Koperasi sektor Produksi											
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20.344.000	1 Laporan	20.344.000	1 Laporan	22.344.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	30.000.000	
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 6											
Kegiatan Prioritas Utama : Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	32.600.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	32.600.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	42.600.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	42.600.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	42.600.000	

4.5Sub Kegiatan yang mendukung proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat sejumlah Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang menjadi fokus pembangunan strategis nasional. Namun, berdasarkan hasil telaah terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan Kebomas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat subkegiatan perangkat daerah di tingkat kecamatan yang secara langsung mendukung pencapaian Proyek Prioritas Nasional dimaksud. Hal ini dikarenakan ruang lingkup Proyek Prioritas Nasional lebih banyak berada pada skala pembangunan lintas wilayah, infrastruktur strategis, serta sektor prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/kabupaten. Dengan demikian, Kecamatan Kebomas berperan secara tidak langsung melalui pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan umum, fasilitasi pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya tetap mendukung iklim kondusif bagi pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional. Sebagai bentuk transparansi dalam dokumen perencanaan ini, ditampilkan Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dengan hasil penelaahan menunjukkan nihil.

Tabel 4.5
Daftar Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Program Strategis Nasional/Proyek Prioritas Nasional/Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Program Strategis : -											
Proyek Prioritas : -											
NIHIL											

4.6Sub Kegiatan yang mendukung Asta Cita pada Rencana Strategis Kecamatan Kebomas.

Asta Cita Presiden 2025-2029 merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategisnya.

Kecamatan Kebomas sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Gresik turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian Asta Cita melalui pelaksanaan sub kegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan. Berdasarkan hasil telaah, terdapat tiga Asta Cita yang didukung dalam Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Asta Cita Ketiga, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
2. Asta Cita Keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Asta Cita Keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perencanaan,

berikut disajikan Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merinci keterkaitan antara Asta Cita dengan subkegiatan Renstra Kecamatan Kebomas.

**TABEL 4.6 DAFTAR SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG ASTA CITA PADA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KEBOMAS**

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Peran gkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
Outcome Prioritas : Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM											
7.01.03.2.01.000 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20.344.000	1 Laporan	20.344.000	1 Laporan	22.344.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	30.000.000	
7.01.03.2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	
Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
Outcome Prioritas : Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak											

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Peran gkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
7.01.03.2.03.000 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	230.040.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	300.494.473	1 Lembaga Kemasyarakatan	278.699.666	1 Lembaga Kemasyarakatan	275.271.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	273.946.000	
7.01.03.2.03.000 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	
Asta Cita : 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.											
Outcome Prioritas : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa-											
7.01.03.2.01.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	32.600.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	32.600.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	42.600.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	42.600.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	42.600.000	

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Peran gkat Daera h
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
7.01.03.2.01.000 2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokume n	15.000.000	1 Dokume n	15.000.527	1 Dokume n	22.529.334	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	



4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kebomas.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. IKU merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas” dapat direalisasikan secara terukur, konsisten, dan berkesinambungan. Penetapan indikator tujuan Renstra Kecamatan Kebomas dilakukan dengan merujuk pada indikator sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, khususnya pada unsur kewilayahan yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan kecamatan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, serta dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh. Sejalan dengan hal tersebut, Kecamatan Kebomas menetapkan 7 (tujuh) indikator tujuan renstra yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama. Ketujuh indikator tersebut meliputi: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan, Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan, Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan, Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan, Rasio Belanja Infrastruktur Desa dan Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa. Untuk memastikan arah pencapaian, berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Tabel. 4.7 Target Pencapaian Indikator Utama (IKU) Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Awal Tahun 2025	Target						Kondisi Akhir Tahun
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas										
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik										
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(Nilai)	87,84	88	88,5	89	89,5	90	90,5	90
Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan										
2.	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	(Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3.	Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan	(Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4.	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	(Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	(Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
6.	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	(Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
7.	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	(Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Pencapaian target dari masing-masing Indikator Kinerja Utama tersebut menjadi tolok ukur utama keberhasilan Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029. Melalui capaian yang terukur, pemerintah meningkatkan kualitas kecamatan diharapkan penyelenggaraan mampu pemerintahan, memperkuat tata kelola yang inklusif, serta memberikan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Selain itu IKU ini juga berfungsi sebagai pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah, sehingga kesinambungan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan dapat terjaga dengan baik.

4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029. IKK digunakan untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat terukur secara objektif dan menjadi acuan bagi penyusunan program serta kegiatan perangkat kecamatan. Dengan demikian, pencapaian IKK merupakan representasi konkret dari implementasi tujuan dan sasaran Renstra yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Perumusan IKK Kecamatan Kebomas didasarkan pada indikator kinerja daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar indikator sasaran yang ditetapkan kecamatan selaras dengan indikator pembangunan daerah, serta menjamin adanya keterpaduan antara capaian kinerja kecamatan dengan target pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh. Dalam Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029, ditetapkan dua sasaran strategis dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut:

Sasaran 1 : *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).*

Sasaran 2 : *Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa dengan enam indikator sasaran, yaitu :*

- a. Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan

- b. Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan
- c. Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan
- d. Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan
- e. Rasio Belanja Infrastruktur Desa
- f. Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah capaian yang diharapkan, berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah.

4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2030

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Awal Tahun 2025	TARGET TUJUAN						Akhir
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik									
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88	88	88.5	89	89.5	90	90.5	90
Meningkatnya Desa/Kelurahan	keselarasan	pembangunan	prioritas	daerah	ditingkat				
Rasio Pendanaan pendidikan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Rasio Belanja Infrastruktur Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Pencapaian target dari setiap Indikator Kinerja Kunci tersebut diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat sinergi pembangunan prioritas daerah di tingkat desa. Dengan keterpaduan perencanaan antara kecamatan dan desa, capaian IKK tidak hanya mencerminkan keberhasilan kinerja Kecamatan Kebomas, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.



BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebomas Tahun 2025 2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang berfungsi sebagai pedoman, arah, serta acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Renstra ini merupakan turunan dan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan. Penyusunan Renstra Kecamatan Kebomas dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan akuntabel dengan mempertimbangkan kondisi objektif wilayah, permasalahan aktual, isu strategis, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan di tingkat kecamatan maupun desa. Sebagai bagian dari siklus manajemen pembangunan daerah, pelaksanaan Renstra Kecamatan Kebomas dilengkapi dengan mekanisme pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dilakukan secara periodik melalui pemantauan dan pelaporan capaian kinerja, sedangkan evaluasi dilaksanakan untuk menilai efektivitas dan relevansi pelaksanaan program serta kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan, penyusunan rencana kerja tahunan, serta penguatan tata kelola pemerintahan kecamatan. Apabila dalam perjalanan terdapat perubahan yang mendasar, baik karena faktor internal maupun eksternal, maka Renstra ini dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025 2029, diharapkan dapat terwujud penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendorong keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen ini memerlukan komitmen bersama, sinergi

lintas sektor, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Akhirnya, semoga dokumen Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi acuan yang jelas, terarah, dan operasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Gresik, September 2025



CAMAT KEBOMAS
TRI JOKO EFENDI, S.H.
Pembina
NIP. 19851227 200901 1 003

